

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat khususnya siswa dapat mengetahui secara umum bahwa bentuk-bentuk negara jika dilihat dari sisi pelaksanaannya atau bisa disebut dilihat dari sisi mekanismenya terbagi menjadi beberapa bentuk seperti monarki, oligarki dan demokrasi (Rahayu:2006). Bentuk-bentuk tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang mudah dimengerti serta dipahami oleh masyarakat seperti monarki yang memiliki ciri khas bahwa itu sebuah kerajaan, oligarki memiliki ciri khas bahwa sebuah negara yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dan bentuk demokrasi yang tidak asing lagi memiliki ciri khas yaitu suatu negara yang kedaulatan berada ditangan rakyat.Namun suatu negara tidak hanya memiliki beberapa bentuk negara saja, tapi juga memiliki beberapa sistem pemerintahan.

Bentuk-bentuk negara memiliki tiga macam bentuk seperti yang telah disebutkan diatas, sedangkansistem pemerintah yang ada pada suatu negara juga memiliki beberapa macam yang dikenal oleh masyarakat secara umum. Sistem pemerintahan itu memiliki beberapa macam seperti sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan campuran serta sistem pemerintahan referendum (Anangkota:2017). Sistem-sistem pemerintahan tersebut juga memiliki ciri khas tersendiri agar mudah diingat serta dipahami oleh masyarakat.

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki ciri khas dengan keanekaragaman masyakat yang ada didalamnya (Rahayu:2017). Banyak perbedaan yang terdapat didalam masyarakat Indonesia, seperti perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan adat istiadat serta perbedaan budaya yang ada didalam masyarakatnya.Meski banyak perbedaan didalamnya namun Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.Negara Indonesia memiliki bentuk negara demokrasi dan menganut sistem pemerintahan presidensial,

dengan keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan Indonesia cocok apabila dipadupadankan dengan bentuk negara demokrasi. Bentuk negara demokrasi sangat identik dengan kedaulatan rakyat dan juga penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mufakat.

Musyawarah untuk mufakat adalah salah satu budaya serta ciri khas yang dimiliki oleh negara Indonesia, karena sesuai dengan bentuk masyarakat negara Indonesia yang beranekaragam serta cita-cita para pendiri bangsa. Musyawarah bukan hanya sekedar cita-cita para pendiri bangsa saja namun juga termuat didalam dasar Negara Republik Indonesia terutama pada sila keempat yang menjunjung tinggi musyawarah dalam penyelesaian suatu masalah di negara Indonesia (Kansil:2011). Masyarakat negara Indonesia yang beranekaragam sangat cocok apabila menerapkan musyawarah dalam penyelesaian suatu masalah dan juga pengambilan suatu keputusan, dengan cara musyawarah ini maka semua pendapat warga dari agama, ras, suku, serta golongan mana pun dapat tersalurkan.

Musyawarah memang suatu budaya serta ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun budaya serta ciri khas tersebut tidak lagi diterapkan dengan baik di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya suatu musyawarah itu untuk mencapai kata mufakat dalam pengambilan keputusan ataupun penyelesaian masalah (Rahayu:2017), namun tujuan itu tidak lagi seperti itu. Karena dalam pengambilan keputusan ataupun penyelesaian masalah yang ada di Indonesia saat ini lebih cenderung melakukan voting daripada mendengarkan pendapat dari peserta-peserta rapat yang terlibat.

Penyimpangan budaya musyawarah itu tidak hanya terjadi dilingkungan masyarakat saja namun juga terjadi di lingkungan pemerintahan (Detiknews:2017). Pemerintahan negara Indonesia yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat melalui wakil-wakil yang telah dipilih oleh rakyat didalam kursi-kursi wakil rakyat seperti DPR, dalam pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan sudah jarang dilakukan musyawarah namun lebih sering menggunakan voting (berdasarkan suara terbanyak).

Agenda yang dimiliki oleh para wakil rakyat memiliki penyebutan rapat yang bertujuan untuk mencari keputusan berdasarkan mufakat (Yuwanto:2016) namun nyatanya didalam rapat-rapat DPR sering diterapkan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (voting) karena banyaknya para anggota DPR yang jarang hadir dalam rapat-rapat agenda DPR. Meski terkadang memang diterapkan musyawarah untuk mufakat dalam rapat anggota DPR namun pelaksanaannya kurang begitu baik. Rapat yang dilakukan sering kali menyimpang tidak sesuai dengan nilai-nilai musyawarah sebenarnya.

Perilaku menyimpang terhadap nilai-nilai dalam musyawarah sering diperlihatkan oleh para anggota DPR dalam rapat. Salahsatu agenda rapat yang memperlihatkan perilaku menyimpang dari nilai-nilai musyawarah oleh para anggota DPR, seperti rapat paripurna hak angket KPK yang berakhir dengan ricuh diiringi dengan tindakan *walk out* sebagian anggota dewan yang kurang setuju dengan keputusan rapat tersebut (Kompas:2017). Itu adalah salah satu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam musyawarah.

Banyaknya perilaku menyimpang dari budaya bangsa Indonesia yaitu musyawarah dalam pengambilan suatu keputusan atau dalam penyelesaian masalah, pembenahan dapat dimulai dari bidang pendidikan. Karena dari bidang inilah para penerus bangsa yang baik dilahirkan. Penerapan nilai-nilai musyawarah yang baik dapat diterapkan melalui metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti penerapan metode diskusi kelas dalam kegiatan pembelajaran (Majid:2014).

Setiap guru dalam pembelajaran tentu saja memiliki metode pembelajaran masing-masing yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Pemerintah telah merealisasikan kurikulum 2013 dengan ciri pembelajaran yang menonjolkan aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, dan berpusat pada siswa. Ini adalah salah satu kondisi sekolah yang melatarbelakangi dilakukan penelitian di sekolah ini karena, sekolah telah menerapkan kurikulum 2013. Metode diskusi kelas

adalah salah satu metode pembelajaran yang cocok diterapkan pada sekolah yang telah menerapkan kurikulum 2013 yang identik dengan berorientasi pada siswa. Kegiatan pengimplementasian nilai musyawarah pada Pancasila melalui metode diskusi kelas sesuai dengan kurikulum yang direalisasikan oleh pemerintah sehingga dapat diimplementasikan di sekolah ini. (Kemendikbud:2019)

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruanglingkup atau cakupan peristiwa atau sesuatu yang diteliti. Sesungguhnya banyak masalah yang dapat diangkat mengenai cara perbaikan moral karena adanya krisis moral yang terjadi pada era globalisasi ini. Namun untuk lebih memfokuskan penelitian maka peneliti membatasi permasalahan ini pada masalah pengembalian nilai-nilai musyawarah yang ada pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didalam negara Indonesia khususnya dalam kursi pemerintahan melalui para penerus bangsa dalam dunia pendidikan dengan Pengimplementasian Nilai Musyawarah Pada Pancasila Melalui Metode Diskusi Kelas Dalam Pembelajaran PPKn Kelas IX Di SMP Negeri 3 Krian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang tersebut adalah :

1. Apa sajakah nilai musyawarah pada Pancasila yang dapat digunakan dalam metode pembelajaran diskusi kelas?
2. Bagaimanakah pengimplementasian nilai musyawarah pada Pancasila dalam metode pembelajaran diskusi kelas?
3. Bagaimana hambatan dari pengimplementasian nilai musyawarah pada Pancasila dalam metode pembelajaran diskusi kelas?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui nilai-nilai musyawarah pada Pancasila yang dapat digunakan dalam metode pembelajaran diskusi kelas.
2. Mengetahui cara pengimplementasian nilai musyawarah pada Pancasila melalui metode pembelajaran diskusi kelas.
3. Mengetahui hambatan dari pengimplementasian nilai musyawarah pada Pancasila melalui metode diskusi kelas.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

Siswa :

1. Lebih mudah memahami tentang materi pembelajaran yang sedang diajarkan.
2. Lebih mudah memahami tentang nilai sila-sila Pancasila melalui penerapan praktik dalam metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Siswa lebih bisa menghargai perbedaan pendapat yang ada dalam penyelesaian suatu masalah.

Guru :

1. Menambah wawasan guru tentang metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PPKn di sekolah.
2. Mempermudah guru dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik.
3. Mempermudah guru dalam memberi penjelasan dan pemaparan materi maupun praktik tentang nilai dari sila-sila Pancasila.

Sekolah

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang pembenahan perilaku menyimpang dalam musyawarah yang dapat dilakukan dari lingkup pendidikan melalui metode diskusi kelas dalam pembelajaran.
2. Apabila hasil penelitian ini diterapkan akan membawa dampak yang positif bagi sekolah tersebut karena berhasil menanamkan nilai positif menjadikan sekolah tersebut lebih berkualitas

Peneliti

1. Menambah pengalaman peneliti dalam hal penelitian tentang pendidikan.
2. Melalui penelitian ini peneliti mengetahui tentang manfaat suatu metode pembelajaran dan metode pembelajaran yang baik untuk mengimplementasikan nilai musyawarah pada Pancasila.

F. Definisi Istilah

1. Nilai Musyawarah Pada Pancasila

Pada Pancasila tiap silanya mengandung nilai-nilai tersendiri yang dijadikan pandangan dalam berkehidupan dimasyarakat. Sila keempat ini yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Berarti yang dikedepankan dan diutamakan dalam sila ini adalah prinsip bermusyawarah untuk mufakat. Pada sila keempat ini masyarakat Indonesia dibiasakan menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah. Keputusan yang diambil harus mufakat artinya semua pihak yang terlibat dalam musyawarah itu menyetujuinya. Dapat dikatakan bahwa nilai yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah nilai musyawarah yang ada pada Pancasila (Suyahmo:2015). Pada penelitian ini peneliti akan mengimplementasikan nilai musyawarah yang ada pada Pancasila tersebut agar siswa (para penerus bangsa) dapat menjalankan musyawarah dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

2. Implementasi Nilai Musyawarah Pancasila

Implementasi sendiri itu dapat diartikan tentang suatu tindakan atau pelaksanaan kegiatan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan. Pancasila adalah suatu pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Didalam pandangan hidup suatu bangsa itu mengandung cita-cita dari bangsa Indonesia, pikiran-pikiran yang mendalam tentang bangsa Indonesia, dan juga harus mengandung suatu pemikiran tentang gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia (Kansil:2011). Pancasila terdiri dari

lima sila yang saling melengkapi dan saling berhubungan. Tidak hanya saling melengkapi dan saling berhubungan saja namun dalam setiap sila Pancasila mengandung nilai. Nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan juga pedoman dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Pengimplementasian Nilai Musyawarah Pancasila adalah suatu kegiatan yang terinci, tidak hanya kegiatan biasa saja namun kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu sehingga bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan ini didalamnya sudah mengandung nilai-nilai dalam Pancasila khususnya nilai musyawarah. Didalam kegiatan yang akan dilakukan harus mengandung nilai musyawarah yang sesuai dengan Pancasila agar tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik.

3. Metode Pembelajaran Diskusi Kelas

Metode Pembelajaran diskusi kelas salah satu jenis metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru dalam pelaksanaan pembelajaran dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Tujuan digunakannya metode pembelajaran dalam suatu kegiatan belajar mengajar adalah agar peserta didik lebih memahami materi yang sedang dibahas. Metode pembelajaran diskusi kelas adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan teknik atau proses pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi dan pelaksana diskusi yang terdiri dari moderator dan notulen juga dari anggota kelas tersebut. (Majid:2014) Dalam metode pembelajaran ini peserta didik tidak hanya diajarkan cara bermusyawarah namun juga cara memimpin, namun fokus dari digunakannya metode ini dalam penelitian ini adalah musyawarah.

